

Isu-isu Administrasi Publik di Era Post-Covid

Ertien Rining Nawangsari
Bagus Nuari Harmawan, dkk.



Isu-isu Administrasi Publik di Era Post-Covid

Penulis : Rumsari Hadi Sumarto, Romel Krismanto Malensang, Caesar Demas Edwinarta, Aries Samudra Wicaksono, Octa Dwi Sofian, Febri Herdiansyah Rahmaddhana, Ardian Rizki Serda Ginata, M. Zaenul Muttaqin, Bagus Nuari Harmawan, Wasisto Raharjo Jati, Oktarizka Reviandani, Vidya Imanuari Pertiwi, Bayu Priambodo, Singgih Manggalou, Indira Arundinasari, Muhammad Ali Mustofa, Muhammad Roisul Umam, Mashudi, Luluk Fauziah, Dul Muid, Diana Hertati, Yusuf Hariyoko, Dida Rahmdanik, Endang indartuti, Teguh Santoso, Theodorus Agustinus Hasiholan, Rafif Pamenang Imawan, Bayu Mardinta Kurniawan, Novy Setia Yunas, Luluk Fauziah, Mashudi dan Anafil Windriya, Dandi Darmadi, Anggie Parawitha Lucca, Adoniati Meyria Widaningtyas, Windu Darajat, Azmi Sahid Fillah, Sofia Al Farizi, Dewi Setyowati.

ISBN :

Copyright ©Mei 2022

Ukuran: 15.5 cm x 23 cm; Hal: vi + 378

Isi merupakan tanggung jawab penulis.
Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak baik sebagian ataupun keseluruhan isi buku dengan cara apa pun tanpa izin tertulis dari penerbit.

Desainer sampul : An Nuha Zarkasyi

Penata isi : An Nuha Zarkasyi

Cetakan 1, Juni 2022

Diterbitkan, dicetak, dan didistribusikan oleh

CV. Literasi Nusantara Abadi

Perumahan Puncak Joyo Agung Residence Kav. B11 Merjosari

Kecamatan Lowokwaru Kota Malang

Telp : +6285887254603, +6285841411519

Email: penerbitlitnus@gmail.com

Web: www.penerbitlitnus.co.id

Anggota IKAPI No. 209/JTI/2018

PRAKATA

Kami bersyukur atas terbitnya buku ini setelah melalui proses seleksi naskah awal dari para penulis baik dari lingkungan UPN Veteran Jawa Timur maupun dari berbagai instansi lain. Tentu saja buku ini tidak akan bisa terwujud tanpa bantuan dari berbagai pihak yang telah berkontribusi dalam bentuk karya maupun saat proses penerbitan mulai dari awal hingga akhir. Kami ingin mengucapkan terimakasih kepada Koorprodi Administrasi Publik FISIP, UPN “Veteran Jawa Timur Dr Ertien Rining Nawangsari M.Si yang telah menginisiasi *call of book chapter* “Isu-Isu Administrasi Publik di Era Pos-Covid.”

Tidak lupa, apresiasi juga diberikan kepada seluruh anggota tim panitia seleksi *call of book chapter*. Panitia dengan penuh semangat telah berkontribusi dalam mempromosikan, menyeleksi setiap naskah yang masuk hingga mengkompilasi draft tulisan.

Akhir kata penulis mengucapkan rasa terima kasih kepada pihak penerbit Literasi Nusantara yang telah memberikan kesempatan untuk menerbitkan buku ini. Sebagai penutup, apresiasi juga patut diberikan kepada jajaran dekanat FISIP UPN “Veteran Jawa Timur”, para kolega dosen FISIP UPN Veteran Jawa Timur karena turut memberikan inspirasi serta dukungan dalam penerbitan buku.

Surabaya, 22 Mei 2022

Bagus Nuari Harmawan

Daftar Isi

Prakata	iii
Daftar Isi	vii
Prolog	1

Potret Inovasi dalam Kebijakan Publik

1. Inovasi Dalam **Governance** Pada Pengembangan Pariwisata Di Kampung Wisata Kota Yogyakarta Di Masa Pandemi
Rumsari Hadi Sumarto.....9
2. Keimigrasian di Masa Pandemi: Dinamika Kebijakan dan Inovasi Birokrasi
Romel Krismanto Malensang 33
3. Inovasi Pelayanan Paspor Di Tengah Pandemi: Studi Implementasi Kebijakan *M-Paspor* Pada Kantor Imigrasi Tanjung Perak
Caesar Demas Edwinarta.....47
4. Inovasi Kebijakan Perizinan Investasi Pariwisata Di Indonesia Pada Era *Post-Covid*
Aries Samudra Wicaksono, S.AP., M.AP.;
Octa Dwi Sofian, S.AP., M.AP.;
Febri Herdiansyah Rahmaddhana, S.I.P., M.AP. 69
5. Kebijakan Bebas Karantina Pariwisata Di Indonesia Dari Perspektif *Adaptive Governance* Pasca Pandemi Covid-19
Ardian Rizki Serda Ginata 93

Turbulensi Pengelolaan Dunia Pendidikan dan Riset

1. Neoliberalisme dan Gejolak Pengelolaan Perguruan Tinggi di Masa Pandemi Covid-19
M. Zaenul Muttaqin dan Bagus Nuari Harmawan 113
2. Dilema Liberalisasi Atau Independensi Penelitian Di Indonesia: Brin Dan Tantangan Kebijakan & Inovasi Riset Paska Pandemi
Wasisto Raharjo Jati 129

3. Optimalisasi Pembelajaran Online Pada Anak Usia Dini di Masa Pandemi Covid-19
Oktarizka Reviandani dan Vidya Imanuari Pertiwi 147
4. Efektifitas Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan Bagi Masyarakat Miskin Dalam Mengakses Pendidikan Di Era Pandemi
Bayu Priambodo, Singgih Manggalou, Indira Arundinasari 155

Governansi dan Problem Tata Kelola Pemerintahan

1. Refocussing Dan Realokasi Anggaran: Sebuah Upaya Dalam Pemulihan Ekonomi Dan Mendorong Inovasi Pemerintah Daerah Pada Masa Pandemi Covid-19
Muhammad Ali Mustofa & Muhammad Roisul Umam 173
2. Kepemimpinan Sektor Publik Dalam Manajemen Logistik Di Era Post-Covid
Mashudi, Luluk Fauziah, Dul Muid 189
3. Pemetaan Problematika Pemberian Bantuan Sosial Di Era Pandemi Covid-19 Di Indonesia
Dr. Diana Hertati, MSi..... 209
4. Pemberdayaan Tenaga Kerja Wanita Luar Negeri Purna Dalam Meningkatkan Kemandirian Ekonomi
Ertien Rining Nawangsari dan Arimurti Kriswibowo 219

Inovasi Birokrasi dan Pelayanan Publik

1. Digitalisasi Desa: Pemikiran Tentang Penerapan Teknologi Untuk Pelayanan Dan Pembuatan Kebijakan Tingkat Desa
Yusuf Hariyoko, Dida Rahmdanik, Endang indartuti, Teguh Santoso 233
2. Pengarusutamaan Prinsip Keterbukaan Pemerintah (*Open Government*) dan Kokreasi dalam Mendorong Tata Kelola Pemerintahan yang Baik pasca Pandemi COVID-19
Theodorus Agustinus Hasiholan 247
3. Gerak Adaptif Birokrasi : Studi pemetaan inovasi-inovasi birokrasi selama pandemi COVID-19 di Indonesia
Rafif Pamenang Imawan dan Bayu Mardinta Kurniawan 267

4.	<i>Triple Disruption</i> Dan Upaya Percepatan Reformasi Birokrasi Di Indonesia <i>Novy Setia Yunas</i>	289
5.	<i>Collaborative Governance</i> Antar Stakeholder Dalam Distribusi Logistik Pelayanan Penanganan Korban Kekerasan Berprespektif Gender Di Kabupaten Sidoarjo Jawa Timur <i>Luluk Fauziah, Mashudi dan Anafil Windriya</i>	303
6.	Peningkatan <i>Social Awerness</i> Produsen dan Konsumen terhadap Produk Halal di Indonesia Pasca Pandemi <i>Dandi Darmadi dan Anggie Parawitha Lucca</i>	325
7.	Inovasi Rompi Pengganti Siaga, Maksimalisasi Siaga Bencana Era Post Covid Bagi Penyandang Disabilitas Netra <i>Adoniati Meyria Widaningtyas, Windu Darajat dan Azmi Sahid Fillah</i>	341
8.	Telehealth dan Solusi Pelayanan Kesehatan di Masa Pandemi <i>Sofia Al Farizi, S.Keb., Bd., M.Kes. Dr. Dewi Setyowati, S.Keb., Bd., M.Ked., Trop.</i>	361

Prolog

Jalan Keluar Dari Administrasi Publik Untuk Pandemi

Bagus Nuari Harmawan & Ertien Rining Nawangsari

Penyebaran covid-19 yang begitu cepat memberikan dampak yang besar bagi perkembangan praktis administrasi publik yang terdiri atas dimensi birokrasi, kebijakan publik hingga sektor publik. Pada ruang lingkup *governance*, pandemi covid-19 memaksa pemerintah harus memiliki kapasitas dan mekanisme kerja yang dinamis (Mazzucato & Kattel, 2020). Pemerintah diharuskan untuk cepat belajar dan tanggap dalam merespon penyebaran penyakit covid-19 yang begitu cepat. Lebih lanjut, pemerintah diharuskan untuk meningkatkan kapasitasnya agar pelayanan publik tetap berjalan dan mampu dinikmati seluruh warga negara secara maksimal. Selain itu, guncangan akibat pandemi juga memaksa para pengelola pemerintahan agar dapat memanfaatkan data dan platform berbasis digital.

Salah satu jalan yang ditempuh oleh pemerintah dalam menghadapi pandemi adalah melakukan inovasi pada sektor publik. Langkah inovasi dilakukan untuk menghadapi situasi yang tidak terduga terjadi sebagai akibat dari serangan covid-19 (Hossain & Yasmin, 2022). Beragam inovasi dilakukan mulai dari pemerintah pada jenjang pemerintah pusat, provinsi hingga pemerintahan di tingkat lokal. Inovasi yang dilakukan pemerintah dapat berbentuk pemanfaatan teknologi informasi seperti *smart city* dalam meminimalisir dampak covid-19 (Harmawan & Farizi, 2020). Selain itu, pemerintah juga melakukan pengelolaan data yang terbuka untuk mencatat perkembangan kasus covid-19 yang menyebar di berbagai wilayah (Francesco Scotti, Francesco Pierri & Flori, 2022). Inovasi tidak hanya pada wilayah yang besar, pada ruang publik yang lebih kecil di tingkat desa juga bermunculan. Bentuk inovasi yang ada di tingkat desa seperti inovasi untuk distribusi bantuan sosial, membentuk

relawan desa hingga memanfaatkan teknologi untuk komunikasi antar relawan dalam merespon pandemi (Susilo et al., 2021).

Pandemi yang mengagetkan penduduk global memberikan pembelajaran kepada seluruh pemerintahan di dunia. Para pejabat perumus dan implementor kebijakan mendapatkan pembelajaran sekaligus pengalaman penting bagaimana secara sigap harus merespon pandemi melalui kebijakan publik (Goyal & Howlett, 2021). Kebijakan publik dituntut untuk melakukan tiga fase penting sebagai akibat dari pandemi covid-19 yaitu upaya normalisasi, adaptasi dan akselerasi (Capano et al., 2022). Fase normalisasi dilakukan sebagai respon atas realitas bahwa covid-19 akan hidup bersama masyarakat dalam jangka waktu yang lama. Pada kondisi ini tentu kebijakan publik harus berupaya untuk melakukan langkah-langkah taktis untuk menetralkan serta memunculkan kenormalan baru di seluruh sektor mulai dari pendidikan, ekonomi, kesehatan, ketenagakerjaan hingga transportasi umum. Proses Adaptasi dilakukan oleh para aktor kebijakan untuk menyesuaikan produk kebijakan dengan fenomena-fenomena baru yang muncul sebagai akibat dari pandemi yang terus berlangsung. Kemudian, fase “akselerasi” diwujudkan dalam sebuah ide dan praktik kerja kebijakan yang responsif dalam menyikapi perubahan yang terjadi sebagai dampak dari pandemi.

Berdasarkan perkembangan praktis dan teoritik diatas, buku ini hadir sebagai sebuah produk akademik yang memotret beragam isu-isu pada lingkup administrasi publik dari awal hingga era post covid-19. Buku ini hadir dari inisiatif Program Studi Administrasi Publik FISIP UPN “Veteran” Jawa Timur dengan melakukan kolaborasi bersama para penulis yang memiliki latar belakang yang beragam dan berasal dari berbagai institusi mulai dari perguruan tinggi hingga lembaga pemikiran atau *think tank*. Kami berharap buku ini dapat berkontribusi dalam memotret beragam fenomena terkait administrasi publik seperti guncangan yang dihadapi institusi akibat pandemi, inovasi pelayanan publik hingga ragam kebijakan yang dikeluarkan dari awal hingga pasca pandemi.

Buku ini terdiri atas 4 bagian yang didalamnya terdapat 21 artikel. Pada bagian pertama, buku ini menampilkan potret inovasi kebijakan yang dilakukan selama dan paska pandemi covid-19. Beberapa tulisan pada bagian ini membahas beberapa contoh kebijakan di sektor imigrasi

seperti “Keimigrasian di Masa Pandemi: Dinamika Kebijakan dan Inovasi Birokrasi ” dan “Inovasi Pelayanan Paspor di Tengah Pandemi: Studi Implementasi Kebijakan M-Paspor Pada Kantor Imigrasi Tanjung Perak.” Selain itu, terdapat beberapa artikel yang membahas tentang kebijakan sektor pariwisata seperti “Inovasi dalam *Governance* Pada Pengembangan Pariwisata di Kampung Wisata Kota Yogyakarta di Masa Pandemi,” “Inovasi Kebijakan Perizinan Investasi Pariwisata di Indonesia Pada Era Post-Covid ” serta “Kebijakan Bebas Karantina Pariwisata di Indonesia dari Perspektif Adaptive Governance Pasca Pandemi Covid-19.”

Bagian kedua menampilkan potret turbulensi pengelolaan dunia Pendidikan dan riset. Terdapat beberapa artikel yang membahas persoalan seperti pengelolaan Pendidikan tinggi yang selama ini menerapkan asas neoliberalisme diguncang oleh pandemi. Kemudian digambarkan pula bagaimana lembaga BRIN menghadapi tantangan dunia riset paska pandemi. Artikel ketiga menulis bagaimana adaptasi pembelajaran pada anak usia dini yang dilakukan dengan menggunakan sarana online selama masa pandemi. Pada bagian ini di tutup dengan artikel yang membahas tentang bantuan sosial yang diberikan kepada keluarga miskin dalam mengakses pendidikan selama penyebaran covid-19. Untuk bagian ketiga, menampilkan isu-isu *governance* atau tata kelola pemerintah serta problem yang terjadi selama dan pasca pandemi. Beberapa isu yang dibahas dalam bagian ini seperti isu anggaran, kepemimpinan sektor publik, bantuan sosial hingga isu pemberdayaan tenaga kerja perempuan.

Pada bagian ke empat menampilkan berbagai inovasi yang dilakukan dalam konteks birokrasi dan pelayanan publik. Beberapa artikel menampilkan ragam inovasi birokrasi seperti digitalisasi di tingkat desa, penerapan *open government*, *collaborative governance* hingga inovasi berbasis *telehealth* sebagai salah satu bentuk inovasi pelayanan publik di sektor kesehatan selama pandemi. Lebih lanjut, terdapat artikel yang membahas “*peningkatan social awerness* produsen dan konsumen terhadap produk halal di indonesia pasca pandemi hingga inovasi berbentuk Rompi Penganti Siaga yang digunakan oleh para penyandang disabilitas tuna netras dalam merespon pandemi covid-19.

Kami berharap buku ini dapat berkontribusi dalam menampilkan respon pemerintah sekaligus problem yang terjadi di ruang publik dan terangkum dalam kajian administrasi publik ketika menyikapi pandemi covid-19 dari awal hingga paska pandemi. Semoga kajian yang terangkum dalam buku ini memberikan wawasan sekaligus pembelajaran bagi pembuat kebijakan, birokrat, akademisi hingga warga negara secara umum dalam menyikapi sebuah fenomena yang tidak pernah terduga sebelumnya.

Daftar Pustaka

- Capano, G., Howlett, M., Jarvis, D. S. L., & Ramesh, M. (2022). Long-term policy impacts of the coronavirus: normalization, adaptation, and acceleration in the post-COVID state. *Policy and Society*, 41(1), 1–12. <https://doi.org/10.1093/polsoc/puab018>
- Francesco Scotti, Francesco Pierri, G. B., & Flori, A. (2022). Responsiveness of open innovation to COVID- 19 pandemic : The case of data for good. *PLoS ONE*, 17(4), 1–19. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0267100>
- Goyal, N., & Howlett, M. (2021). “Measuring the Mix” of Policy Responses to COVID-19: Comparative Policy Analysis Using Topic Modelling. *Journal of Comparative Policy Analysis: Research and Practice*, 23(2), 250–261. <https://doi.org/10.1080/13876988.2021.1880872>
- Harmawan, B. N., & Farizi, S. Al. (2020). Kota Cerdas di Era Pandemi : Inovasi Smart Kampung Banyuwangi Menyambut New Normal. In Indri Dwi Apriliyanti (Ed.), *Optimisme Melampaui Musibah Pandemi (Antisipasi Kebijakan Publik Pasca Pandemi)* (Issue December). Pusat Kajian Manajemen dan Kebijakan Publik FISIPOL UGM.
- Hossain, M. Z., & Yasmin, T. (2022). Factors affecting public sector innovation during COVID-19 pandemic in Bangladesh: an analysis on three cases. *International Review of Public Administration*, 27(1), 1–14. <https://doi.org/10.1080/12294659.2022.2044105>
- Mazzucato, M., & Kattel, R. (2020). COVID-19 and public-sector capacity. *Oxford Review of Economic Policy*, 36(822781), S256–S269. <https://doi.org/10.1093/oxrep/graa031>

Susilo, D., Hidayat, E., & Marta, R. F. (2021). Village public innovations during COVID19 pandemic in rural areas: Phenomena in Madura, Indonesia. *Cogent Social Sciences*, 7(1). <https://doi.org/10.1080/23311886.2021.1905919>

PEMBERDAYAAN TENAGA KERJA WANITA LUAR NEGERI PURNA DALAM MENINGKATKAN KEMANDIRIAN EKONOMI

**Ertien Rining Nawangsari
Arimurti Kriswibowo**

PENDAHULUAN

Indonesia memiliki kekayaan alam yang melimpah dengan sumber daya manusia yang besar, dibuktikan dengan penduduk Indonesia masuk lima besar penduduk terpadat di dunia. Menurut data BPS (2016) Pertumbuhan masyarakat di Indonesia hingga tahun 2016 ini telah lebih dari 200 juta jiwa dengan komposisi wanita lebih banyak dari pada laki-laki. Seiring bertambahnya pertumbuhan penduduk ini menjadi masalah tersendiri dengan semakin bertambahnya masyarakat usia produktif. Pertumbuhan yang besar yang tidak dibarengi dengan persiapan SDM yang handal dapat berdampak terjadinya pengangguran terbuka dengan segala persoalan. Sebagai solusi dari persoalan pengangguran salah satunya dengan memilih menjadi tenaga kerja di luar negeri sebagai untuk bisa meningkatkan ekonomi keluarga, karena mereka dari masyarakat berpenghasilan menengah kebawah. Khususnya wanita, yang mempunyai kesempatan untuk bekerja sangat terbatas, sehingga mereka harus berjuang menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW) di luar negeri.

Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang bekerja di luar negeri memiliki beberapa kategori, yakni pekerja ahli dan pekerja rumah tangga. Namun kebanyakan dari TKI merupakan pekerja rumah tangga, baik sebagai asisten rumah tangga maupun sebagai pengasuh bayi atau lansia. Hal ini disebabkan yang menjadi TKI terutama TKW tidak memiliki kemampuan dan keahlian yang lebih. Juga karena tingkat pendidikan yang rendah, yakni lulusan Sekolah Dasar (SD) atau Sekolah Menengah Pertama (SMP). Kemauan, semangat dan tekad yang

gigih tidak diimbangi dengan keahlian yang memadahi, tak jarang hal ini membuat TKI menjadi korban kekerasan atau penipuan majikan ataupun Penyedia Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJ-TKI).

Hal ini terjadi akibat para calon pekerja tidak cermat dalam memilih PJ-TKI yang resmi. Banyak dari TKI menjadi korban penipuan calo TKI, dengan diiming-imingi gaji yang akan diperoleh nantinya besar. Proses TKI yang salah. Disisi lain, para calo TKI ini mendapatkan keuntungan yang lebih besar dibandingkan TKI yang diberangkatkan. Banyak dari TKI terutama TKW ditipu oleh calo TKI, dengan menyebutkan mereka akan bekerja sebagai pekerja rumah tangga namun kenyataan mereka dipekerjakan sebagai pekerja seks. Hal inilah yang kemudian menjadi sorotan pemerintah.

Menjadi TKW di luar negeri itu mempunyai batasan waktu yang disebut masa kontrak kerja. Ketika kontrak kerja sudah habis otomatis TKW itu harus pulang kampung kembali. Mayoritas TKW yang telah bekerja diluar negeri memungkinkan mereka akan kembali lagi untuk bekerja, namun banyak juga yang tidak kembali ke luar negeri karena terkendala beberapa alasan. Jumlah TKW yang bagi diri, lingkungan, maupun negara. Jumlah yang cukup banyak ini, tidak seharusnya hanya menjadi obyek namun dapat diubah ke arah yang lebih berguna dengan pola pemberdayaan (*empowering*) atau belajar kecakapan hidup (*Life skills Education*), sebagai solusi sosial yang terjadi di masyarakat.

Di beberapa daerah di Indonesia, TKW yang berada di luar negeri ini mendominasi jumlah tenaga kerja. Masyarakat Indonesia dan khususnya yang berjenis kelamin wanita merupakan hal yang semestinya menjadi perhatian penuh berbagai pihak. Para kaum wanita mantan TKW ini juga masih sebagai masyarakat usia kerja yang masih menganggur dapat diberikan suatu pelatihan agar bisa memberi penghasilan untuk kehidupannya itu sangat membutuhkan pendampingan dan pelatihan keterampilan agar mereka bisa menghasilkan sesuatu karya dan menambah penghasilan mereka.

Upaya untuk meningkatkan kehidupan yang lebih layak dan sejahtera tidak hanya melalui suatu pendidikan formal, melainkan dapat juga dikembangkan melalui jalur non formal yaitu Belajar Kecakapan Hidup (*Life Skills Education*). Namun pokok persoalan dari seluruh permasalahan adalah bagaimana menempatkan masyarakat yang tidak memiliki kesempatan untuk berpendidikan tinggi atau masyarakat

yang tergolong dalam mantan tenaga kerja wanita seperti ini dapat diberdayakan (*empowering*). Pemberdayaan dapat diartikan sebagai proses dimana individu atau kelompok mampu meningkatkan kapasitas dan kemampuan mereka untuk memahami, menafsirkan masalah yang mereka hadapi dan kemudian mampu menentukan kebutuhan serta menerjemahkannya kedalam tindakan dengan berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan kegiatan (Samah dan Aref, 2009). Dengan adanya pemberdayaan tersebut diharapkan mantan TKW dapat mandiri dan menambah penghasilannya serta mengurangi jumlah migrasi TKW untuk bekerja ke luar negeri kembali

Di Indonesia terdapat beberapa daerah yang cukup banyak menyalurkan tenaga kerja ke luar negeri, pada urutan pertama yaitu Kabupaten Indramayu dengan total 5.266 tenaga kerja dari bulan januari hingga maret 2019, kemudian diurutan kedua yaitu Kabupaten Lombok Timur dengan total 2.989 tenaga kerja dari bulan januari hingga maret 2019, pada urutan ketiga yaitu Kabupaten Cirebon dengan total 2.799 tenaga kerja dari bulan januari hingga maret 2019, dan pada urutan ke empat yaitu Kabupaen Cilacap dengan total 2.716 tenaga kerja (BNP2TKI, 2019).

Banyak faktor yang berpengaruh terhadap keputusan TKI/calon TKI untuk bermigrasi mencari pekerjaan di luar negeri serta memilih negara tertentu sebagai tujuannya. Sampai saat ini, pengiriman TKI untuk bekerja di luar negeri masih didominasi oleh tenaga berpendidikan dan berkeahlian rendah (*low education and skill*). Berdasarkan jabatan pekerjaannya, sebagian besar juga bekerja sebagai pekerja rumah tangga dan pengasuh anak/pengurus orang tua (*caregiver/ caretaker*), yang karena sifat pekerjaannya sangat erat terkait dengan tingginya proporsi TKI perempuan. Alasan utama untuk memilih bekerja di luar negeri juga didominasi oleh alasan ekonomi (memenuhi kebutuhan hidup, memperbaiki taraf ekonomi, meningkatkan status sosial dan lain sebagainya), baik sebagai faktor pendorong di daerah asal seperti melihat tetangga yang berhasil setelah bekerja menjadi TKI di luar negeri maupun faktor penarik di negara tujuan serta semakin sulitnya mencari pekerjaan di Negara Indonesia (Aswatini, 2002; UN-ESCAP & UN-ESCWA, 2013).

Meningkatnya jumlah Tenaga kerja wanita yang ingin bekerja di luar negeri tentunya memiliki dampak negatif jika masa kontrak dari pekerja tersebut telah habis, tentunya para pekerja tersebut besar kemungkinan akan kembali ke Indonesia dan secara langsung dapat meningkatkan angka pengangguran di Negara Indonesia. Badan Pelindung Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) telah memprediksi sebanyak 34.300 pekerja migran kembali pulang ke tanah air pada periode Mei – Juni 2020, kepulangan pekerja ini dikarenakan habis masa kontrak di Negara penempatan masing-masing. Untuk mengatasi persoalan tersebut dan menekan angka lonjakan pengangguran akibat persoalan tersebut maka perlu adanya peran pemerintah maupun peran organisasi atau elemen masyarakat dalam melakukan pemberdayaan kepada mantan TKW.

Proses dan Pemberdayaan TKW Purna

Pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu strategi pembangunan yang saat ini menjadi salah satu strategi utama untuk memerangi kemiskinan yang ada di Indonesia. Menurut Pijonoko dan Pranaka (1996): konsep pemberdayaan, manusia sebagai subjek dari dirinya sendiri. Proses pemberdayaan yang menekankan pada proses memberikan kemampuan kepada masyarakat agar menjadi berdaya, mendorong atau memotivasi individu agar mempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan pilihan hidupnya.

Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya itu, dengan mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya. Kedua, memperkuat potensi atau daya yang dimiliki masyarakat (*empowering*). Dalam rangka ini diperlukan langkah-langkah lebih positif, selain dari hanya menciptakan iklim dan suasana. Perkuatan ini meliputi langkah-langkah nyata, dan menyangkut penyediaan berbagai masukan (*input*), serta pembukaan akses ke dalam berbagai peluang (*opportunities*) yang akan membuat masyarakat menjadi berdaya. Pemberdayaan bukan hanya meliputi penguatan individu anggota masyarakat, tetapi juga pranata-pranatanya. Menanamkan nilai-nilai budaya modern, seperti kerja keras, hemat, keterbukaan, dan kebertanggungjawaban adalah bagian pokok dari upaya pemberdayaan ini.

Pemberdayaan juga mengandung arti perbaikan mutu hidup atau kesejahteraan setiap individu dan masyarakat baik dalam arti : 1) perbaikan ekonomi, 2) perbaikan Kesejahteraan social (pendidikan dan kesehatan), 3) kemerdekaan dalam segala bentuk penindasan, 4) terjamin keamanan, 5) terjaminnya hak asasi manusia yang bebas dari rasa takut dan kekhawatiran. Pemberdayaan sendiri adalah sebuah proses agar setiap orang menjadi cukup kuat untuk berpartisipasi dan menekankan bahwa orang memperoleh ketrampilan, pengetahuan dan kekuasaan yang cukup untuk mempengaruhi kehidupannya dan kehidupan orang lain yang menjadi perhatian nya.

Maka kondisi dimana Mayoritas perempuan yang menjadi TKW lebih memilih untuk bekerja karena adanya keinginan mereka dalam menempatkan posisi ekonomi yang lebih baik. Banyak alasan yang menjadikan perempuan memilih untuk bekerja sebagai TKW diantaranya ingin meningkatkan ekonomi, ingin menjadi kaya, ingin mendapat gaji besar, ikut-ikutan tetangga, ingin terlihat seperti tetangga mereka yang telah berhasil bekerja di luar negeri. Di Tulungagung sebagian besar TKW bekerja di Hongkong dan Korea. Uang hasil pekerjaan mereka dikirim ke orang tua atau keluarga mereka untuk memperbaiki rumah, membiayai keluarga, membeli tanah, dan hewan ternak, kemudian setelah mereka bekerja di luar negeri kehidupan para TKW berubah dimana pekerjaan yang dilakukan seputar pedagang, petani, buruh, hingga pengangguran sehingga pendapatan yang diperoleh pun hanya ala kadarnya dan kondisi ekonomi tidak lebih baik bahkan sering kali mengalami kekurangan (Dwiningwarni, 2019).

TKW dianggap sebagai “kaya instan” tidak jarang dari mereka yang membangun rumah besar dengan gaji yang mereka dapatkan. Jadi tidak heran jika rumah para TKW lebih mewah dari pada rumah para pegawai lokal maupun yang berkiprah dalam dunia pendidikan. Menurut (Aemanah, 2019), sebenarnya masyarakat mempunyai banyak potensi, namun kurang di perhatikan. Sehingga potensi tersebut tidak terlihat dan terkubur begitu saja. Untuk menggali potensi-potensi dari masyarakat dilakukan metode pendampingan *Asset Based Community Development* (ABCD), yaitu pendekatan pendampingan yang mengupayakan pengembangan masyarakat harus dilaksanakan sejak dari awal menempatkan manusia untuk mengetahui apa yang menjadi kekuatan yang dimiliki, serta segenap potensi dan aset potensial yang

dimiliki untuk dimanfaatkan.

Dalam metode ABCD ini memiliki lima langkah kunci :

1. *Discovery* (menemukan).

Proses menemukan kembali kesuksesan dilakukan melalui proses percakapan atau wawancara dan harus menjadi penemuan personal tentang apa yang menjadi kontribusi individu yang memberi hidup pada sebuah kegiatan atau usaha. Pada tahap *discovery* ini, kami mulai memindahkan tanggung jawab untuk perubahan kepada para individu yang berkepentingan dengan perubahan tersebut yaitu entitas lokal. Memberikan penyadaran tentang apa kelebihan dan kemampuan diri dalam proses pengembangan kekuatan pribadi mereka.

2. *Dream* (mimpi).

Dengan cara kreatif dan secara kolektif melihat masa depan yang mungkin terwujud, apa yang sangat dihargai dikaitkan dengan apa yang paling diinginkan. Pada tahap ini, setiap orang mengeksplorasi harapan dan impian mereka baik untuk diri mereka sendiri maupun untuk kelompok. Mereka mengembangkan kemampuan dirinya untuk mendukung pencapaian dari mimpi mereka.

3. *Design* (merancang).

Proses dimana seluruh komunitas terlibat dalam proses belajar tentang kekuatan atau aset yang dimiliki agar bisa mulai memanfaatkannya dalam cara yang konstruktif, inklusif, dan kolaboratif untuk mencapai aspirasi dan tujuan seperti yang sudah ditetapkan sendiri. Tahap ini adalah memberikan kemampuan untuk merancang merencanakan apa yang akan dicapai dalam proses meningkatkan kemandirian secara ekonomi.

4. *Define* (menentukan).

Masyarakat diminta untuk kembali ke visi masa depan, elemen – elemen mana yang mereka rasa paling penting bagi mereka dan menyeru untuk bertindak. Secara bersama – sama, komunitas diminta untuk mengidentifikasi elemen-elemen keberhasilan yang diperlukan demi mewujudkan mimpi-mimpi dalam bentuk prinsip, kriteria dan indikator-indikator. Mereka sudah dapat menentukan apa yang akan dilakukan dan dikerjakan untuk pengembangan kemampuan diri.

5. *Destiny* (memastikan).

Tahap ini merupakan serangkaian tindakan baru dan inovatif yang mendukung pembelajaran dan inovasi berkelanjutan. Tahap ini secara khusus memusatkan pada komitmen dan arah ke depan individu dan komunitas.

Pada dasarnya pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu strategi pembangunan yang saat ini menjadi salah satu strategi utama untuk memerangi kemiskinan yang ada di Indonesia. Pemberdayaan masyarakat yang diberikan kepada TKW purna merupakan salah satu cara untuk mencegah mereka kembali bekerja di luar negeri. Dengan cara mendorong para TKW yang sudah purna tugas dengan memanfaatkan potensi yang ada dalam dirinya menjadi kunci terlaksananya pemberdayaan masyarakat. Selain itu, pemberian keahlian-keterampilan kepada TKW purna dapat meningkatkan kapasitas mereka untuk dapat berkembang sesuai dengan kemauannya. Sehingga dengan proses pemberdayaan tersebut maka akan meningkatkan kemandirian secara ekonomi, social dan kesejahteraan bagi TKW purna kerja.

Salah satu tahap pemberdayaan yang dapat dilakukan adalah melaksanakan program pemberdayaan bagi TKW Purna yang berbasis Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), pendirian UMKM ini dapat didasari dengan tidak dimilikinya pekerjaan oleh TKW purna (mantan TKW) setelah kembali ke Indonesia. UMKM mampu menjadi solusi penanggulangan kemiskinan di Indonesia. Penanggulangan kemiskinan dengan cara mengembangkan UMKM memiliki potensi yang cukup baik, karena ternyata sektor UMKM memiliki kontribusi yang besar dalam penyerapan tenaga kerja, yaitu menyerap lebih dari 99,45% tenaga kerja dan sumbangan terhadap PDB sekitar 30%.

Program Aksi Pengentasan Kemiskinan melalui pemberdayaan UMKM sejak tahun 2005, memberikan pengembangan pada empat jenis kegiatan pokok yang akan dilakukan yaitu, (1) penumbuhan iklim usaha yang kondusif, (2) pengembangan sistem pendukung usaha, (3) pengembangan wirausaha dan keunggulan kompetitif, serta (4) pemberdayaan usaha skala mikro. Seperti yang telah dilakukan oleh PT Pertamina RU VI Balongan yang hadir sebagai *private sector* untuk mengaplikasikan pemberdayaan masyarakat melalui program *Corporate Social Responsibility* dengan menjalankan

Program Pemberdayaan TKW Purna Berbasis UMKM. Program ini sudah terlaksana sejak tahun 2010. Kegiatan UMKM tersebut berupa Kegiatan antara lain pendampingan, peningkatan pengetahuan dengan melaksanakan pelatihan, memberikan modal berupa alat produksi, perubahan kemasan ramah lingkungan dan memperluas pemasaran.

Kendala – Kendala Pemberdayaan TKW

Usaha pemberdayaan TKW tidak lepas dari adanya kendala-kendala yang akan dan harus dihadapi, untuk itu perlu adanya dukungan dari segala aspek untuk mendukung berjalannya usaha pemberdayaan tersebut. berikut merupakan hasil dari beberapa kendala yang ada dalam usaha pemberdayaan TKW :

1. Rendahnya Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu factor yang sangat penting dalam pekerjaan dan yang menyebabkan banyaknya TKW mempunyai posisi pekerjaan sebagai Asisten Rumah Tangga adalah rendahnya pendidikan TKW. Pendidikan yang rendah menunjukkan bagaiman cara atau kemampuan berfikir dan ketrampilan dianggap kurang. Suatu contoh, rendahnya pendidikan seseorang menyebabkan seseorang cenderung masa bodoh dengan upaya-upaya pemberdayaan yang diberikan untuk meningkatkan kesejahteraan hidup. Mereka berfikir dengan bekerja diluar negeri sebagai TKW akan menjamin kesejahteraan mereka, berbeda dengan membuka suatu usaha atau melanjutkan pendidikan menurut mereka hal tersebut membuang-buang waktu dan belum tentu dapat menghasilkan seperti mereka bekerja sebagai TKW.

2. Modal Usaha

Kebanyakan para TKW ketika pulang tidak memiliki tabungan sebagai modal usaha hal tersebut dikarenakan, ketika mendapatkan gaji mereka cenderung mengirimkan kepada keluarganya dan digunakan untuk memperbaiki rumah di kampung halaman atau memberi perabotan sekunder dan tersier (misalnya motor, mesin cuci dan lain-lain). Mereka kurang dibekali ketrampilan dalam pengelolaan keuangan dan mempersiapkan masa depan bagi mereka setelah purna masa kerja.

3. Kurangnya Keterampilan

Banyak TKW yang setelah masa kerjanya selesai pulang dan akhirnya menganggur. Selama bekerja mereka tidak ada kesempatan dalam mengembangkan keahlian atau ketrampilan diluar pekerjaannya. Biasanya mereka hanya dapat melakukan pekerjaan rumah tanpa adanya keterampilan lain, hal inilah juga yang menyebabkan salah satu kendala dalam usaha pemberdayaan mantan TKW.

4. Akses untuk Membuka Suatu Usaha

Pemerintah merupakan salah satu komponen utama yang juga ikut andil dalam usaha pemberdayaan mantan TKW. Pemerintah perlu meningkatkan pendampingan dalam menyiapkan pemberangkatan TKW dan ketika masa purna kerja. Sehingga TKW dapat mempersiapkan keberlanjutan dalam peningkatan kemandirian ekonomi setelah purna kerja, terutama adalah memberikan tambahan ketrampilan dalam pengembangan usaha UMKM.

Namun demikian tidak semua TKW yang purna kerja akan selalu mengalami kegagalan dalam meningkatkan kemandirian social maupun ekonomi. Ada beberapa contoh TKW setelah purna kerja bias merintis usaha dan sukses dalam mengembangkan usahanya. Contoh TKW yang Sukses adalah Pertama, Bu Risma merupakan warga Indonesia yang kini tinggal di Arab Saudi. Selain menjadi TKW, ia kini mengelola bisnis yang ia bangun seorang diri. Beliau memiliki usaha catering Haji dan camilan khas Nusantara. Meski tak lulus SD, pendapatan hingga 1 juta real yang setara dengan Rp3,7 miliar pun menjadi pengalaman sehari-hari. Kedua Nurchaeti, Mantan TKW yang sukses jadi pengusaha dan mampu berdayakan kelompok rentan (Gambar 2.4.). Nurchaeti memiliki pabrik CV N&N Internasional yang memproduksi keripik buah. Produknya diminati pasar internasional. Belasan negara, termasuk negara Eropa dan kawasan Timur Tengah, mengimpor produk olahan Titi yang menawarkan citarasa nusantara. Membanggakan sekaligus membantu pendapatan negara. Namun akhir Desember tahun lalu, China mengumumkan kasus Covid-19 pertamanya. Dunia mulai siaga. Akses antar negara ditutup, dan tentu saja, kegiatan ekspor impor terpengaruh. Penjualan produk Titi anjlok hingga 70%. Kemudian Titi membuka divisi baru yaitu *snack box* dan *lunch box*. Berkat keuletannya, divisi baru yang digagas Titi

mampu membalikkan pendapatan yang semula ambles jadi merangkak naik. Buktinya, Titi bisa membeli 2 ruko bisnis secara tunai untuk mengembangkan bisnisnya. Tak hanya itu, perusahaan Titi juga malah membuka rekrutmen untuk posisi baru, tanpa memangkas karyawan yang ada. Dua sosok tersebut adalah merupakan bukti bahwa ada proses pemberdayaan yang berhasil memberikan keberdayaan dan membuktikan bahwa mereka juga dapat mempertahankan usahanya dalam kondisi ditengah pandemi.

KESIMPULAN

Indonesia memiliki beberapa daerah yang cukup banyak menyalurkan tenaga kerja ke luar negeri. Banyak faktor yang membuat masyarakat Indonesia untuk bermigrasi mencari pekerjaan di luar negeri. Sebagian besar faktor yang mendorong mereka untuk memilih bekerja di luar negeri didominasi oleh alasan ekonomi, serta semakin sulitnya mencari pekerjaan di Negara Indonesia. Pengiriman TKI untuk bekerja di luar negeri masih didominasi oleh tenaga kerja wanita (TKW) dan tenaga berpendidikan dan berkeahlian rendah. Permasalahan akan muncul jika para TKW habis kontrak dan kembali ke Indonesia. Mereka akan kesulitan mencari pekerjaan dan menjadi pengangguran, sehingga banyak yang memutuskan untuk kembali bekerja ke luar negeri. Upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut yaitu dengan pemberdayaan TKW Purna.

Pemberdayaan dilakukan dengan menggali potensi-potensi masyarakat dengan menggunakan metode *Asset Based Community Development* (ABCD), yaitu *Discovery* (menemukan), *Dream* (mimpi), *Design* (merancang), *Define* (menentukan), dan *Destiny* (memastikan). Salah satu tahap pemberdayaan yang dapat dilakukan adalah melaksanakan program pemberdayaan bagi TKW Purna yang berbasis Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Usaha pemberdayaan TKW tidak lepas dari adanya kendala-kendala yang akan dan harus dihadapi, antara lain: rendahnya pendidikan, modal usaha, kurangnya keterampilan, dan akses untuk membuka suatu usaha, sehingga perlu adanya dukungan dari segala aspek khususnya pemerintah untuk mendukung berjalannya pemberdayaan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Aemanah, U. (2019). Upaya Pemberdayaan Keluarga Tkw Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Rumah Tangga. *Empower: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, 4(1), 134-148.
- Aswatini. 2002. Indonesian female labour migrants: Experiences working overseas (A case study among returned migrant in West Java). *Journa of population*, 8 (1),40-63.
- Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI). 2019. Data Penempatan Dan Perlindungan PMI Periode Maret 2019. Pusat Penelitian Pengembangan dan Informasi (Puslitfo). Jakarta
- Badan Pusat Statistik. 2016. *Booklet Indeks Pembangunan Manusia Metode Baru*. Jakarta
- Dwiningwarni, Sayekti Suindyah., Tatik Muluyati., Yudha Prasetyo., dan Ahmad Zuhdi A. 2019. Kebijakan Pemberdayaan Mantan TKW Untuk Mengentaskan Kemiskinan Di Tulung Agung. *Ejournal Stiedewantara : Seminar Nasional Ekonomi & Bisnis Dewantara*. Hal 63-70.
- Mardikanto,Totok, Soebianto, Poerwoko, Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik, 2017, Penerbit Alfabeta Bandung
- Samah, A.A., & Aref, F. 2009. Empowerment as an Approach for community Development in Malaysia. *World Rural Observation*. 1(2): 63-68.